

Outlook Perpajakan & PNBP 2021

Rasio Pajak

Rasio Pajak terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) atau *tax ratio* selama satu dekade ini sekitar 10-14 persen. Rasio pajak tahun 2019 sebesar 9,8 persen merupakan rasio pajak terendah selama satu dekade ini. Rasio pajak mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya penerimaan dari sektor migas yang disebabkan oleh melemahnya harga minyak dunia pada semester pertama tahun 2019, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu instrumen stimulus perekonomian, dan pertumbuhan restitusi pajak yang cukup tinggi.



Realisasi Penerimaan Pajak & PNBP

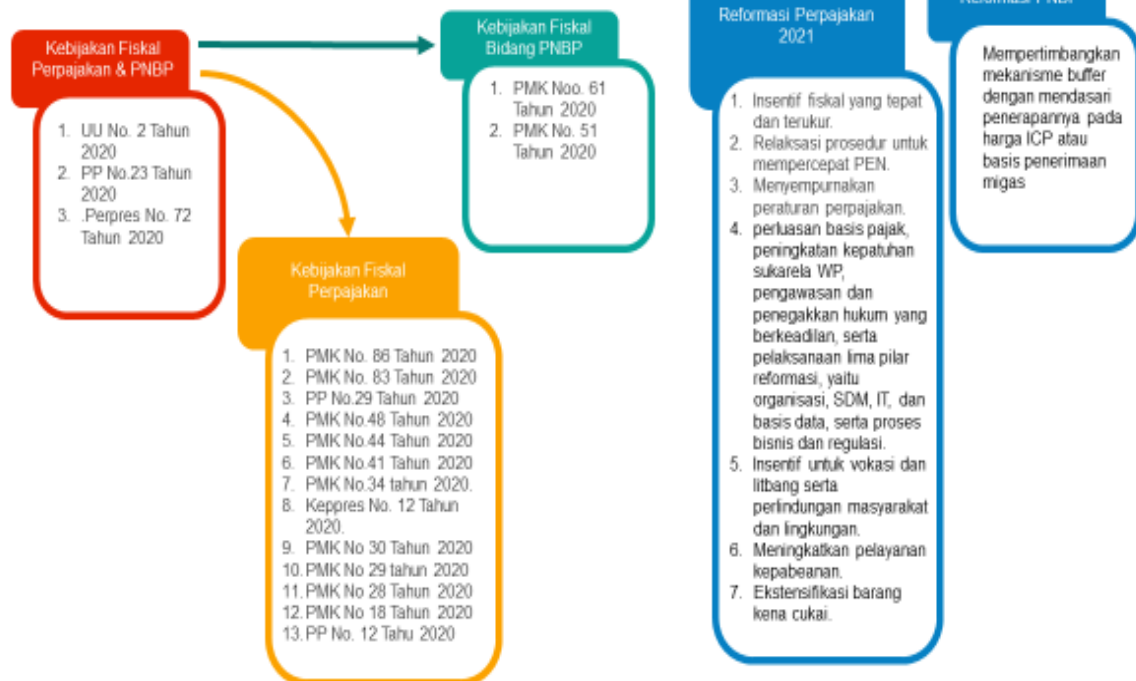
Perkembangan kinerja realisasi PNBP memiliki kinerja yang positif melebihi target, kecuali untuk tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari target. Realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh kinerja PNBP sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah. Realisasi PNBP menunjukkan tren peningkatan sebesar 52,18 persen dari tahun 2010 dengan total penerimaan sebesar Rp267,5 triliun menjadi Rp407,1 triliun pada tahun 2019. Namun, realisasi PNBP tahun 2019 tumbuh negatif sebesar 1,0 persen jika dibandingkan realisasi PNBP tahun 2018. Faktor yang menyebabkannya adalah penurunan realisasi PNBP SDA sebesar 14,7 persen dari tahun 2018 sebesar Rp180,6 triliun menjadi Rp154,1 triliun pada tahun 2019. Penurunan realisasi PNBP SDA ini terjadi karena harga minyak mentah dan *lifting* sebagai penopang utama penerimaan SDA mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Tax Buoyancy

Tax buoyancy atau hubungan antara pertumbuhan *Produk Domestic Bruto* (PDB) dan pajak tahun 2010-2019, rata-rata hanya sebesar 0,8. Sedangkan *tax buoyancy* tahun 2019 sebesar 0,18 lebih rendah dari nilai rata-rata selama tahun 2010-2019. Makna dari nilai 0,18 adalah 1 persen pertumbuhan PDB hanya diikuti pertumbuhan penerimaan pajak 0,18.

Kebijakan Fiskal di Bidang Perpajakan & PNBP



Outlook Penerimaan Perpajakan 2021

Outlook 2021
Menurut Kemenkeu penerimaan perpajakan 2021 berkisar 8,25-8,36 persen.

Tantangan

1. Meningkatkan tax ratio ditengah pandemic.
2. Terjadi pergeseran struktur perekonomian akibat perlambatan sektor yang berkontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan.
3. Pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat.
4. Perbaiki kualitas SDM.

Peluang

Menurut DJP: Melakukan pemetaan sektor usaha potensial yang memiliki tingkat pemulihan lebih cepat dan mengoptimalkan penerimaan dari transaksi perdagangan melalui system elektronik.

Menurut DDTTC: ditambah dengan mengoptimalkan penerimaan melalui penggunaan pajak yang berbasis kekayaan baik dari kekayaan bersih maupun warisan.

Outlook Penerimaan PNBP 2021

Outlook 2021
Berdasarkan kemenkeu, outlook PNBP 2021 diproyeksikan kisaran 1,6 – 2,3 persen

- Tantangan**
1. Penurunan harga komoditas yang akan berdampak pada penurunan penerimaan PNBP SDA.
 2. Kecenderungan penurunan produksi migas.
 3. PNBP masih bergantung pada penerimaan dari SDA.
 4. Belum optimalnya penerimaan PNBP dari non SDA.
 5. Terkait aspek compliance wajib bayar PNBP dalam memenuhi kewajibannya secara tepat jumlah dan waktu serta dari memperkuat sisi pengawasan.
 6. Permasalahan idle asset yang perlu dioptimalkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber PNBP.

Peluang
Meningkatkan peluang PNBP dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan proses bisnis dalam pelaksanaan tugas fungsi antara lain pencarian cadangan sumber daya alam baru, inovasi penyediaan layanan dan administrasi secara daring, mekanisme pelaksanaan tugas pemerintah dengan melibatkan sektor privat antara lain melalui KPBU dan *Public Private Partnership*, perencanaan PNBP dengan memperhitungkan potensi PNBP.

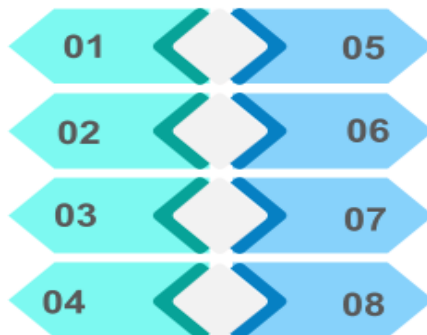
Rekomendasi

01 Perlu adanya kebijakan baru yang *extraordinary*, menyesuaikan dengan kondisi luar biasa saat ini yang membutuhkan birokrasi efisien, efektif namun tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.

02 Perbaiki pada pola sosialisasi insentif fiskal pada pelaku usaha atau pihak yang terdampak Covid-19.

03 Perbaiki kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan terukur baik terhadap sisi demand maupun sisi supply.

04 Pemerintah harus berupaya menyelesaikan regulasi turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.



05 Pemerintah perlu optimalisasi PNBP baik melalui sumber PNBP yang sudah ada atau penggalan potensi PNBP baru dan perubahan formula dan perubahan formula perhitungan terhadap jenis dan tarif PNBP yang sudah ada.

06 Mengintensifkan kewajiban instansi pengelolaan PNBP (JP PNBP) dalam melakukan verifikasi dan monitoring PNBP yang wajib dibayarkan oleh wajib bayar.

07 Peningkatan kualitas pengawasan PNBP baik melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi maupun pengawasan melalui koordinasi atau sinergi antar unit terkait pengawasan PNBP yang dilakukan melalui K/L bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L.

08 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan Kerjasama antar Lembaga terkait dalam pengelolaan PNBP.

09

Pemerintah perlu menyusun skema pemanfaatan aset khususnya untuk idle aset yang tepat sehingga menjadi satu sumber penerimaan PNBP.